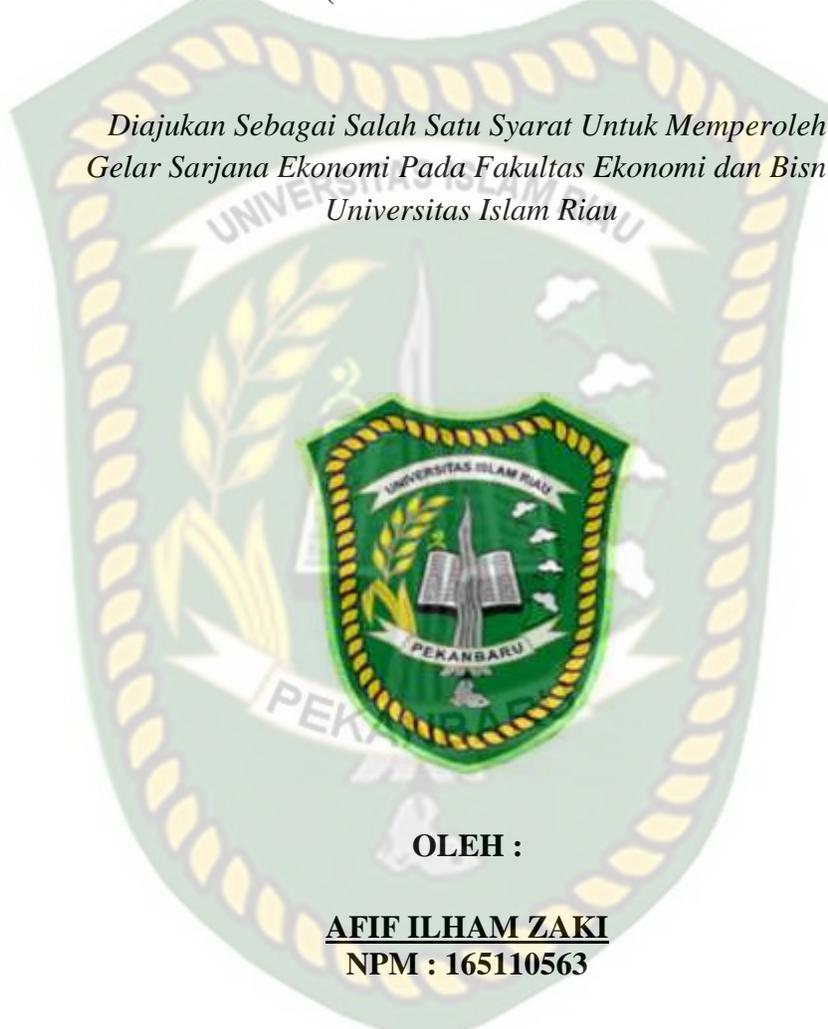


SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
DI PROVINSI RIAU (DENGAN PENDEKATAN GINI RATIO)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Riau*



OLEH :

AFIF ILHAM ZAKI
NPM : 165110563

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : AFIF ILHAM ZAKI
TEMPAT/TGL LAHIR : BANGKINANG, 07 OKTOBER 1998
NPM : 165110563
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN S1
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI
RIAU (DENGAN PENDEKATAN GINI RATIO)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil karya orang lain (**bukan plagiat/duplikasi**) dan sistematika penulisannya sudah mengikuti kaedah dari karya tulis ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut atau dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 26 OKTOBER 2021

Ya
SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
TOL. 20
METERAI
TEMPER
C04AJX527770085
AFIF ILHAM ZAKI

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI RIAU (DENGAN PENDEKATAN GINI RATIO)

OLEH :

AFIF ILHAM ZAKI

NPM. 165110563

Dosen Pembimbing :

1. Drs. H.ARMIS, M. Si

2. SINTA YULYANTI, SE.,M.Dev

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan pendekatan Gini Ratio. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui pengamatan dan pendataan laporan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, dalam angka dari hasil sensus Nasional. Data yang bersumber dari BPS berupa data Produk Domestik Regional Bruto perkapita atas Dasar Harga Konstan, dan data jumlah penduduk. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Gini Ratio di Provinsi Riau selang tahun 2010-2020 berada pada rentang sedang ($>0,3$) atau pada level sedang atau moderat.

Kata Kunci : Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Gini Ratio

ABSTRACT

ANALYSIS OF INEQUALITY LEVEL OF INCOME DISTRIBUTION IN RIAU PROVINCE (WITH A GINI RATIO APPROACH)

BY :

AFIF ILHAM ZAKI

NPM. 165110563

CONSULTANT :

1. Drs. H.ARMIS, M. Si
2. SINTA YULYANTI, SE.,M.Dev

This research was conducted in Riau Province. The purpose of this study was to analyze and identify the level of inequality in income distribution using the Gini Ratio approach. The source of data used in this study is secondary data obtained through observation and data collection reports sourced from the Central Statistic Agency (BPS) of Riau Province, in figures from the results of the National census. Data sourced from BPS in the form of data on Gross Regional Domestic Product per capita on the basis of constant prices, and data on population. The results showed that the Gini Ratio in Riau Province between 2010-2020 was in the moderate range (>0.3) or at the moderate or moderate level.

Keyword : Income Distribution Inequality, Gini Ratio

KATA PENGANTAR

Bimillahirrahmanirrahim Alhamdulillah robbil'alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini sebagai tugas akhir dalam kurikulum Universitas Islam Riau (UIR), sebagai syarat untuk melengkapi dan memperoleh gelar sarjana pada program S-1. Skripsi ini yang berjudul “ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI RIAU (DENGAN PENDEKATAN GINI RATIO)”

Dalam penyelesaian skripsi ini, di kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Dr. Eva Sundari, SE,MM. CRBC selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs. M. Nur, MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Armis, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Sinta Yulianti, S.E,M.Ec,Dev selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu.

5. Bapak Ibu dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tata Usaha beserta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang sangat membantu terselesainya skripsi ini.
7. Khususnya penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua ayahanda Drs. Duriat dan ibunda Nurhasanah S.Ag, yang sangat saya sayangi dan cintai sepanjang hari telah memberikan semangat serta dorongan untuk kesuksesan dalam bangku pendidikan, serta kepada saudara Abdi Fadhlán Zikri, dan Muhammad Raihan Zuhdi yang selalu mendoakan, dan perhatiannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan, materi dan penyusunannya oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun menuju perbaikan ke arah kemajuan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021

Penulis

Afif Ilham Zaki

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 : Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 : Rumusan Masalah.....	10
1.3 : Tujuan Penelitian.....	11
1.4 : Manfaat Penelitian.....	11
1.5 : Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESA	
2.1 : Telaah Pustaka.....	13
2.1.1 : Pembangunan Ekonomi.....	13
2.1.2 : Dampak Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	14
2.1.3 : Ketimpangan Pendapatan	17
2.1.4 : Pengukuran Ketimpangan Pendapatan	19
2.2 : Penelitian Terdahulu.....	24

2.3 : Hipotesa.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	27
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.4 Metode Analisis Data.....	28
3.4.1 Deskriptif.....	28
3.4.2 Kebijakan Pemerintah.....	29
BAB VI GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Provinsi Riau.....	30
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis Provinsi Riau.....	30
4.1.2 Gini Ratio Ketimpangan Pendapatan Prov. Riau..	31
4.2 Hasil Penelitian.....	33
4.2.1 Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Riau.....	33
4.2.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau Menekan Ketimpangan pendapatan.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : PDRB Menurut Kab/Kota Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010-2020 Milyar Rupiah.....	6
Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota di Provinsi Riau, 2010-2019...	7
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 4.1 : GINI RATIO PROVINSI RIAU, 2010-2020.....	32
Tabel 4.2 : HASIL GINI RATIO PROVINSI RIAU, 2010-2020.....	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kurva Lorenz.....	22
Gambar 4.1 : Perkembangan Gini Ratio.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu pembangunan daerah bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Secara teoritis dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat, semakin baik pula tingkat kesejahteraannya.

Hal yang terpenting dalam pembangunan daerah adalah bahwa daerah tersebut mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang dimilikinya, kemudian menganalisisnya untuk membuat sektor-sektor tersebut menjadi nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah. Perencanaan pembangunan mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembagunan secara lebih cepat dan terarah. Realisasi tujuan pembangunan harus dilaksanakan secara tepat, komprehensif, dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada

daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Indonesia yang kaya akan dengan potensi sumber daya alamnya, baik yang terbarukan (hasil bumi) maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral). Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola seoptimal mungkin, dengan meningkatkan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah yang tinggi dan mengurangi ekspor bahan mentah. Indonesia juga memainkan peranan makin besar di perekonomian global.

Banyak negara sedang berkembang termasuk Indonesia masih beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi harapan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahap awal akan menyebabkan peningkatan ketimpangan pembagian pendapatan. Kondisi ini sesuai dengan kenyataan empiris di negara-negara sedang berkembang yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat pada umumnya disertai dengan pembagian pendapatan yang makin timpang (Wie, 1981).

Masalah ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan merupakan suatu masalah pokok yang selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Oleh sebab itu penghapusan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi mutlak diperlukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apabila pemerintah tidak aktif melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi, maka kegiatan perekonomian akan diatur oleh mekanisme pasar dan kemudian memberikan dampak negatif bagi pembangunan selanjutnya yaitu melebarnya jurang kesejahteraan dari masa ke masa antara daerah kaya dengan daerah miskin sebagai akibat dari kegiatan ekonomi daerah kaya lebih lancar dibandingkan dengan daerah miskin (Myrdal, 1975). Dengan demikian pembangunan ekonomi lebih cepat berlaku di daerah yang lebih maju, sehingga menimbulkan disparatif pendapatan dan tingkat kemiskinan proporsional dengan majunya tingkat pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan tiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Jadi, menurut ekonomi makro, pengertian pertumbuhan ekonomi

merupakan penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional (Tambunan, 2001).

Menurut Lincoln Arsyad (1999) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Jadi pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan “*Trickle Down Effects*” atau efek cucuran kebawah dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan bahkan berjalan cenderung sangat lambat.

Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilemma yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang. *Trade off* atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan dimaqsing-masing daerah selalu terjadi. Professor Kuznet telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dengan kata lain ketimpangan yang tinggi. Namun, pada tahap-tahap berikutnya hal tersebut akan membaik. Hipotesis ini dinamakan dengan hipotesis “U-Terbalik” Kuznet. Sesuai dengan rangkaian perubahan kecenderungan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien Gini dan pertumbuhan PDB perkapita yang akan

terlihat seperti kurva yang berbentuk huruf U terbalik. Menurut kuznet distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000).

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spritual. Isu pemerataan pembangunan, baik dalam lingkup regional maupun nasional, akhir-akhir ini telah banyak mendapatkan perhatian dan dibicarakan dalam berbagai kesempatan. Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkaian dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di suatu daerah, perluasan lapangan kerja, meratakan pembagian pendapat masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatra juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Provinsi Riau yang terdiri dari 12 kabupaten/kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pendapatan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Sehingga dalam prakteknya bagaimana proses pembangunan yang terjadi di daerah tersebut dapat dimaksimalkan dan menekan nilai ketimpangan pembangunan tersebut kearah pemerataan pembangunan ekonomi dengan memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai keunggulan kompetitif di setiap daerah untuk dikembangkan.

Apalagi Provinsi Riau salah satu propinsi yang potensial dengan potensi perkembangan ekonomi yang cukup besar.

Untuk menggambarkan kesejahteraan pada tiap penduduk didalamnya, maka untuk mengukurnya menggunakan PDRB per kapita daerah, karena alat ini merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah, dimana jika semakin besar PDRB per kapitanya maka bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB per kapita di tiap kabupaten/kota di propinsi Riau dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Tabel 1.1: PDRB di Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010-2020 (Milyar Rupiah)

NO	Tahun	PDRB
1	2010	388 578.23
2	2011	410 215.84
3	2012	425 626.00
4	2013	436 187.51
5	2014	447 987.78
6	2015	448 991.96
7	2016	458 769.34
8	2017	470 983.51
9	2018	482 158.38
10	2019	495 845.91

NO	Tahun	PDRB
11	2020	490 024,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Riau, 2021

Bahwa dari data diatas menunjukkan pendapatan dan kesejahteraan di Provinsi Riau mengalami fluktuasi dari tahun 2010-2020, pada tahun 2010 dengan nilai 388 578.23 Milyar Rupiah, mengalami kenaikan ke tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011 dengan nilai 410 216.84 Milyar Rupiah, lalu pada tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012 dengan nilai 425 626 Milyar Rupiah, dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2013 dengan nilai 436 187.51 Milyar Rupiah, hingga tahun 2019 dengan nilai 495 845.91 Milyar Rupiah. Dan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan oleh pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia serta khususnya Provinsi Riau dengan nilai 490 024,47 Milyar Rupiah.

Tabel 1.2: Jumlah Penduduk di Provinsi Riau, 2010-2019

No	Tahun	Penduduk (Jiwa)
1	2010	5 574 928
2	2011	5 726 241
3	2012	5 879 109
4	2013	6 033 268
5	2014	6 188 442
6	2015	6 344 402

No	Tahun	Penduduk (Jiwa)
7	2016	6 500 971
8	2017	6 657 911
9	2018	6 811 909
10	2019	6 971 745

Sumber : *Badan Pusat Statistik Riau, 2020*

Tinggi dan rendahnya PDRB per kapita di masing-masing daerah dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya nilai PDRB. Selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk dalam suatu daerah tersebut. Pada tabel 1.2 dapat dilihat, jumlah penduduk dari tahun 2010-2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya di provinsi Riau. Dimana jumlah penduduk yang paling banyak bermukim di Kota Pekanbaru tepatnya pada tahun 2018 dengan nilai 1 117 359 jiwa, kemudian di Kab. Kampar dengan nilai 851 837 jiwa, dan Kab. Indragiri Hilir dengan nilai 731 396 jiwa, sedangkan daerah paling sedikit jumlah penduduknya bermukim di Kab. Kepulauan Meranti tepatnya pada tahun 2018 dengan nilai 184 372 jiwa.

Perbedaan tinggi rendahnya PDRB per kapita yang dimiliki tiap kab/kota menyebabkan terjadinya ketidakmerataan. Hal ini diindikasikan dapat menyebabkan ketimpangan antar kab/kota di Provinsi Riau. Terdapat beberapa faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah yaitu sebagai berikut :

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
2. Alokasi investasi

3. Tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah
4. Perbedaan sumber daya alam antar daerah
5. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah

Ketimpangan daerah dapat diukur dengan indeks Williamson. Williamson (1965) meneliti antara hubungan disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, yang menemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu (Sutarno, 2003).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam penelitian ini dimana melalui data-data yang telah dipaparkan, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh masing-masing kab/kota di Provinsi Riau berbeda, terdapat kab/kota yang mengalami pertumbuhan yang positif namun ada juga yang mengalami pertumbuhan yang negatif. Selain itu besar nilai PDRB per kapita setiap daerah yang memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok antara daerah yang satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan antar daerah yang belum merata.

Ketimpangan daerah yang dibiarkan secara terus menerus tersebut akan membawa pengaruh yang merugikan, yang mendominasi pengaruh yang menguntungkan, seperti dapat mengakibatkan adanya kecemburuan sosial antar daerah dan mengganggu kestabilan perekonomian.

Maka dari itu hal tersebut yang melatarbelakangi perlu untuk mengetahui bagaimana ketimpangan terhadap tingkat pertumbuhan yang terjadi di Provinsi Riau. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil judul “ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROROVINSI RIAU DENGAN PENDEKATAN GINI RATIO”.

1.2 Rumusan Masalah

Ketidakmerataan pertumbuhan dan distribusi pendapatan perkapita merupakan permasalahan klasik dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, karena memiliki potensi kekayaan sumber daya alam seperti migas dan pertambangan yang mendominasi pembentukan PDRB provinsi. Kontribusi PDRB yang tinggi diberikan oleh Provinsi Riau terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun yang dihasilkan tersebut belum diterima secara merata oleh seluruh kab/kota di provinsi Riau. Laju pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, dimana terdapat daerah yang mengalami pertumbuhan positif bahkan ada juga yang negatif. Selain itu besar PDRB per kapita antar kab/kota di Provinsi Riau dimana terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara daerah satu dengan yang lain. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan antar kab/kota di Provinsi Riau belum terlaksana secara merata. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan bahwa masalah yang ingin disampaikan, yaitu :

1. Seberapa tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Riau?

2. Apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan perkapita di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau.
2. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam aspek yang sama maupun yang terikat.
3. Sebagai sarana mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneliti, sistematika pembahasan, dan gambaran umum tentang penelitian yaitu :

ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI RIAU DENGAN PENDEKATAN GINI RATIO yang berisi seberapa tinggi tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA

Pada bab ini berisi telaah pustaka dan landasan teori yang memuat penelitian terkait sebelumnya sebagai referensi yang kemudian dianalisis kekurangan dan kelemahan peneliti yang lalu. Sehingga dapat menjadi acuan dalam penelitian ini untuk lebih disempurnakan. Serta berisi pendapat-pendapat dari tokoh yang ahli dalam bidang terkait.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan metode penelitian yang berkaitan dengan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan penyajian penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang telah dikemukakan serta hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis sebagai sumbangan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

pembangunan ekonomi diartikan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Terdapat tiga unsur penting didalamnya yaitu (1) pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru, (2) usaha meningkatkan pendapatan per kapita, (3) kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Namun pendapatan perkapita tidak cukup untuk menjadi fokus strategi pembangunan semata, bahkan menimbulkan adanya ketimpangan, kemiskinan, pengangguran dan ketidakmerataan dalam distribusi yang banyak dialami oleh negara-negara yang mengalami kenaikan pendapatan per kapita (Suryana, 2000). Oleh sebab itu definisi lainnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menurut Todaro (2006) pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut.

Pembangunan dalam arti luas mencakup aspek kehidupan baik ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. Beberapa ekonom membedakan pengertian pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

1. peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada satu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk.
2. Perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam satu negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi atau tidak perubahan struktur ekonomi. Jadi, pada umumnya pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu dibarengi dengan pembangunan (Suryana, 2000).

2.1.2 Dampak Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Adanya pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di mana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Penduduk disatu pihak dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan. Kondisi-kondisi kependudukan, data dan informasi kependudukan sangat berguna dalam memperhitungkan berapa banyak

tenaga kerja akan terserap serta kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dan jenis-jenis teknologi yang akan dipergunakan untuk memproduksi barang dan jasa.

Di pihak lain pengetahuan tentang struktur penduduk dan kondisi sosial ekonomi pada wilayah tertentu, akan sangat bermanfaat dalam memperhitungkan berapa banyak penduduk yang dapat memanfaatkan peluang dan hasil pembangunan atau seberapa luas pangsa pasar bagi suatu produk usaha tertentu (Todaro, 2003).

Adam Smith (2003), teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi.

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Buku malthus yang dikenal paling luas adalah *principles of population*. Menurut Mulyadi (2003), dari buku tersebut akan dilihat bahwa meskipun malthus termasuk salah satu seorang pengikut Adam Smith, tidak semua pemikirannya sejalan dengan pemikiran Smith. Disatu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat

manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia. Kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama tetap jumlahnya. Dalam banyak hal justru luas tanah untuk pertanian berkurang karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik dan bangunan lain serta pembuatan jalan. Menurut Malthus manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Malthus tidak percaya bahwa teknologi mampu berkembang lebih cepat dari jumlah penduduk sehingga perlu dilakukan pembatasan dalam jumlah penduduk. Pembatasan ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral.

Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (*equilibrium*). Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (*full-employed*). Dengan demikian dibawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan dengan tingkat upah yang lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk memperkerjakan mereka lebih banyak. Kritikan Jhon Maynard Keynes (1883-1946) terhadap sistem klasik salah satunya adalah tentang pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh.

Dari keseluruhan teori tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk yang mendominasi sebagian besar teori-teori pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960-an dan pada awal tahun 1980-an dikenal dengan bentuk aliran ekonomi sisi penawaran atau *supply-side economics*, yang memfokuskan pada kebijakan untuk meningkatkan output nasional melalui akumulasi modal. Karena model ini menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat pertumbuhan GNP, artinya dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja, untuk memaksimalkan pertumbuhan GNP dan kesempatan kerja dengan cara memaksimalkan tingkat tabungan dan investasi.

2.1.3 Ketimpangan pendapatan

Ketimpangan pendapatan ekonomi merupakan hal umum yang terjadi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ini awalnya disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam dan kondisi demografi yang terdapat di daerah masing-masing wilayah. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketimpangan menyebabkan kebijakan retribusi pendapatan yang tentunya akan mahal (Wijayanto, 2016).

Ketimpangan pendapatan merupakan sangat penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Sehingga dalam proses pembangunan yang

terjadi di daerah tersebut dapat dimaksimalkan dan dapat menekan nilai ketimpangan pembangunan dan pemerataan pembangunan ekonomi dengan memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai keunggulan kompetitif di setiap daerah untuk dikembangkan. Jadi ketimpangan yang terjadi di setiap daerah dapat diturunkan dan terus berkembang (Iswanto, 2015).

Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris tahun 1973 (dalam Arsyad, 2002) menyatakan bahwa faktor penyebab ketimpangan pendapatan di negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan turunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi, dimana penerimaan pendapatan uang yang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah dan rendahnya mobilitas sosial.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi golongan kapitalis.

7. Memburuknya nilai tukar bagi mata uang negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju sebagai akibat ketidakelastian barang-barang ekspor dari negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

2.1.4 Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

Terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam pengukuran ketimpangan pendapatan, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga dibawah diagonal. Rasio Gini bernilai antara 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan *complete inequality* atau *perfectly unequal*, di mana seluruh penduduk menempati satu lokasi di suatu negara dan tidak ada penduduk di lokasi lainnya. Nilai menunjukkan *perfectly equal*, yaitu penduduk terdistribusikan sempurna di seluruh wilayah suatu negara. Jadi, semakin besar nilai rasio konsentrasi Gini, semakin tidak pemerataan antara distribusi penduduk dan jumlah lokasi (sumber: <http://sirusa.bpsgo.id>).

Rumus Gini Ratio atau koefisien Gini diformulasikan dalam rumus dibawah ini (Arif Munandar, Fikriah, 2016), yaitu:

$$GR = \frac{1}{n} - \sum_{i=1}^n P_i \frac{(F_i + F_{i-1})}{2}$$

Keterangan:

GR : Koefisien Gini

P_i : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-1

F_i : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-1

F_{i-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke i-1

Indeks Gini memiliki beberapa kelebihan untuk dijadikan acuan mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, kelebihan tersebut antara lain (Bappeda Kota Semarang, 2012: 7-8):

1. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah.
2. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*).
3. Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan.
4. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan.

b. Distribusi Ukuran (*size distribution*)

Menurut Todaro dan Smith (2006), distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga.

Secara umum mengukur ketimpangan yang pertama dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk miskin. Selanjutnya dapat diukur dengan melakukan perbandingan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang kaya. Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk miskin menerima diatas 17 persen pendapatan nasional.

Menurut Hudyanto (2014), derajat ketimpangan pendapatan berdasarkan distribusi ukuran yaitu :

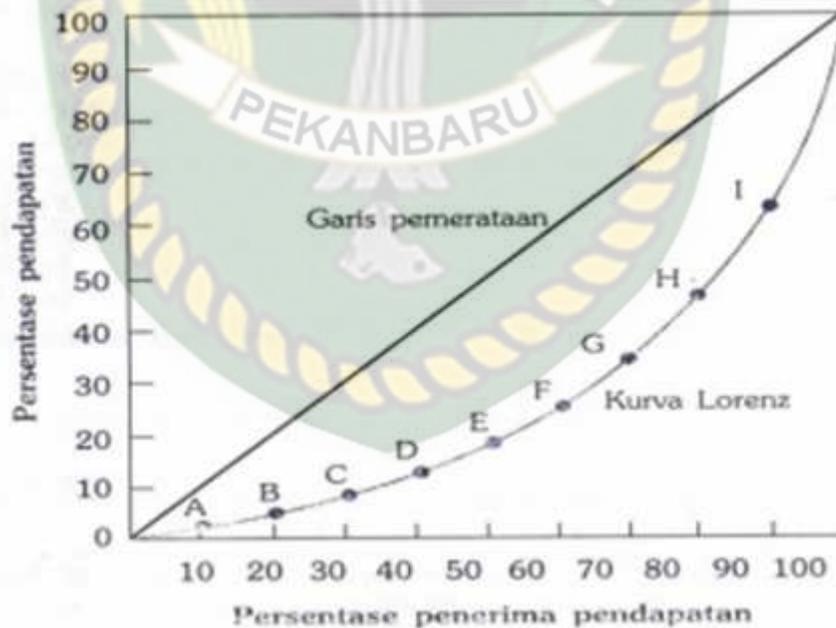
1. Tingkat ketimpangan berat, apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
2. Tingkat ketimpangan sedang, apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional.

3. Tingkat ketimpangan ringan, apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima 17 persen dari pendapatan nasional.

c. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz merupakan suatu kurva yang digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan. Kurva Lorenz dikenalkan oleh Conrad Lorenz, seorang ahli statistika dari Amerika Serikat pada tahun 1905. Kurva Lorenz menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (share) pendapatan mereka. Kurva ini menggambarkan hubungan antara persentase jumlah penduduk dengan persentase pendapatan yang diterima (Arsyad, 2010).

Gambar 2.1 Kurva Lorenz



Menurut Todaro dan Smith (2006), kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selamanya, misalnya satu tahun. Kurva ini terletak didalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase komulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tak merata.

Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, yang akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. Oleh karena itu tidak ada suatu negarapun yang mengalami pemerataan sempurna atau ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatannya, maka kurva-kurva Lorenz untuk setiap negara terletak disebelah kanan kurva diagonal. Semakin tinggi derajat ketidakmerataan kurva Lorenz itu akan semakin melengkung (cembung) dan dan semakin mendekati sumbu horizontal sebelah bawah (Maipita, 2014).

d. Bank Dunia

Menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk. Terdapat tiga klasifikasi ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia, yaitu :

1. Ketimpangan Tinggi. 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima < 12% dari total pendapatan.
2. Ketimpangan Sedang. 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima 12%-17% dari total pendapatan.
3. Ketimpangan Rendah. 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima > 17% dari total pendapatan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dengan menerapkan segala aspek yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, diluar aspek penelitian penulis tidak akan memasukkan karena tidak berkaitan sebagai bahan dan teori dalam penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arief Munandar, Fikriah (2016)	Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pengeluaran Antar Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya	Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa distribusi pendapatan dari kesembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat tiga kecamatan yaitu kecamatan Manggeng, Lembah Sabil, dan Kuala Batee dengan ketimpangan sedang dengan nilai Gini Ratio berkisar antara 0,3-0,5. Sedangkan kecamatan lainnya berada pada ketimpangan rendah atau pemerataan sempurna. Namun secara keseluruhan distribusi pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya dikategorikan pada tingkat ketimpangan rendah yaitu nilai Gini Ratio sebesar 0.2944.
2	Shita Tiara (2013)	Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Sumatra Utara	Ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Sumatra Utara yang dilihat dari Gini Ratio selama tahun pengamatan berada di angka 0,35 yang artinya pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatra Utara relatif merata, dan nilai Gini Ratio tertinggi menurut kab/kota selama tahun pengamatan terjadi di samosir dengan angka 0,447.

No	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Harjono Imbran, Rusdiyanto L Tone (2017)	Identifikasi dan Analisis Gini Ratio Kabupaten Gorontalo	Indek Gini Ratio Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2012-2014 berada di angka lebih dari 0,4, angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki tingkat ketimpangan yang relatif sedang. Sedangkan angka Gini Ratio di Kabupaten Gorontalo berdasarkan data survei terbaru menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gorontalo selalu tidak menentu setiap tahunnya, fluktuasi di atas 0,4 hingga tahun 2017, yang walaupun hal ini masih dikategorikan rendah ketimpangan yang terjadi.

2.3 Hipotesa Penelitian

Agar dapat mengarahkan hasil penelitian tersebut, maka disampaikan suatu hipotesa pada penelitian. Hipotesa merupakan suatu pernyataan yang dijelaskan dan kebenarannya masih lemah. Hipotesa juga masih dipandang sebagai konklusi yang bersifat sementara. Berdasarkan penjelasan latar belakang, rumusan masalah diatas maka diatas maka dapat di ambil hipotesa sebagai berikut :

1. Diduga tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Riau cukup tinggi.
2. Diduga kebijakan pemerintah untuk menekan tingkat ketimpangan di Provinsi Riau berpengaruh positif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau. Dipilihnya lokasi ini dikarenakan Provinsi Riau mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, disamping itu di Provinsi Riau juga mengalami tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu gejala berdasarkan data yang ada, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif dari tahun 2010-2020. Data sekunder merupakan suatu data yang didapatkan melalui pihak lain, tidak langsung didapatkan dari peneliti yang bersumber dari subjek penelitiannya. Data sekunder bersumber dari data dokumentasi atau data laporan yang telah ada (Azwar, 2001).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau yang meliputi :
 - a. Data Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010-2020
 - b. Data jumlah penduduk tahun 2010-2019

2. Serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian, seperti internet, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Bahwa data yang telah dikumpulkan di dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan data sekunder, maka pengumpulan data yang dilakukan/diterapkan didalam penulisan ini ialah dengan cara teknik dokumentasi yaitu yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Riau dari tahun 2010-2020 dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian, sesuai dengan variabel-variabel yang diperlukan.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Deskriptif

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah menggunakan satu variabel yaitu menggunakan pendekatan Gini Ratio (GR), dimana Gini Ratio digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan melihat apakah suatu ketimpangan bisa dikatakan atau dikategorikan sebuah ketimpangan rendah, sedang, dan tinggi. Dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 hingga 1. Dimana nilai 0 menunjukkan bahwa pemerataan yang baik sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa semakin mendekati nilai 0 maka semakin baik pemerataannya dan sebaliknya semakin menjauhi nilai 0 dan mendekati nilai 1 maka semakin besar tingkat ketimpangannya.

3.4.2 Kebijakan Pemerintah

Untuk melihat besarnya tingkat distribusi ketimpangan pendapatan pemerintah sangat diharapkan dalam peranannya, salah satu upaya untuk menekan tingkat distribusi ketimpangan pendapatan yaitu redistribusi sumber pendapatan negara juga perlu dilakukan secara merata dengan memanfaatkan penerimaan pajak terhadap hal-hal yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Selanjutnya, peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan publik yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat juga dilakukan. Investasi juga perlu ditingkatkan untuk menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi yang juga diikuti dengan pendidikan dan pelatihan vokasi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Riau

4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis Provinsi Riau

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat No.19 tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-Undang No. 61 tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 – 5 Maret 1958).

Karena terletak di garis khatulistiwa. Provinsi Riau tergolong kedalam daerah yang beriklim tropis, terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas 8.915.016 Ha, (89.150 km²), keberadaanya membentang lereng Bukit Barisan sampai Selat Malaka terletak antara 01°05'00" Lintang Utara atau antara 100°00' -105°05 '00" Bujur Timur. Di daratan terdapat 15 sungai, di antaranya ada empat sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana penghubung seperti Sungai Siak dengan panjang 300 km dan kedalam 8-12 meter, Sungai Rokan sepanjang 400 km dan kedalam 6-8 meter, Sungai Kampar dengan panjang 400 km dan kedalam +6 meter, dan Sungai Indragiri sepanjang 500 km dengan kedalam 6-8 an meter. Keempat sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.

Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan Negara tetangga dan Provinsi lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatra Utara
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatra Barat
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Utara

4.1.2 Gini Ratio Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Riau

Kesenjangan atau ketimpangan pendapatan antar daerah merupakan konsekuensi yang logis dari proses suatu pembangunan dan merupakan tahap perubahan dalam suatu pembangunan itu sendiri. Perbedaan dari tingkat kemajuan antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang akan merugikan dan mendominasi pengaruh yang menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah. Selain pertumbuhan ekonomi, proses dari pembangunan juga bertujuan untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran.

Gini ratio digunakan sebagai alat untuk melihat bagaimana terjadinya suatu ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan adanya perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau tertinggal. Ketimpangan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dengan adanya ketimpangan ialah dapat mendorong wilayah lainnya yang

begitu kurang maju untuk dapat bersaing dalam meningkatkan pertumbuhan kesejahteraannya. Dilain sisi dampak negatif yang akan ditimbulkan antara lain melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan dianggap tidak adil ataupun tidak merata secara umum.

Tabel 4.1 : GINI RATIO PROVINSI RIAU, 2010-2020

NO	Tahun	Bulan	Gini Ratio
1	2010	Maret	0.326
		September	
2	2011	Maret	0.363
		September	0.324
3	2012	Maret	0.404
		September	0.383
4	2013	Maret	0.374
		September	0.393
5	2014	Maret	0.353
		September	0.379
6	2015	Maret	0.364
		September	0.366
7	2016	Maret	0.347
		September	0.347
8	2017	Maret	0.325
		September	0.325
9	2018	Maret	0.327
		September	0.347
10	2019	Maret	0.330
		September	0.331
11	2020	Maret	0.329
		September	0.321

Sumber : BPS Indonesia, 2020

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat dan disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan di Provinsi Riau mengalami fluktuasi.

Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan yang tertinggi terjadi pada tahun 2012 di semester pertama yaitu di angka 0,404 sedangkan kesenjangan terendah terjadi di angka 0,321 pada tahun 2020 di semester kedua pada tahun tersebut.

Gini rasio bertujuan untuk mengetahui dan menghitung seberapa besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu daerah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk. Adanya ketimpangan yang mencolok antar berbagai daerah, ketimpangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang sangat berbeda antar daerah satu dengan yang lainnya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Riau

Penelitian ini menjelaskan dan memaparkan data sekunder yang membahas berkaitan dengan Analisis Tingkat ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya deskripsi data dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:

Gini ratio ini digunakan untuk menganalisa dan mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan, koefisien gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna di mana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Michael P. Todaro dkk, (2010) mengungkapkan bahwa koefisien gini dan ukuran ketimpangan agregat merupakan perangkat yang sangat mudah digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan

pendapatan relatif di suatu negara, adalah dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh segi empat di mana kurva Lorenz itu berada.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari BPS, bahwa Gini Ratio Provinsi Riau untuk tahun 2010 s.d. 2020 adalah sebagai berikut;

Tabel 4.2: ANALISIS GINI RATIO PROVINSI RIAU, 2010-2020

No	Tahun	Bulan	Gini Ratio	Keterangan
1	2010	Maret	0,32	Sedang
		September		
2	2011	Maret	0,36	Sedang
		September	0,32	
3	2012	Maret	0,40	Sedang
		September	0,38	
4	2013	Maret	0,37	Sedang
		September	0,39	
5	2014	Maret	0,35	Sedang
		September	0,37	
6	2015	Maret	0,36	Sedang
		September	0,36	
7	2016	Maret	0,34	Sedang
		September	0,34	
8	2017	Maret	0,32	Sedang
		September	0,32	
9	2018	Maret	0,32	Sedang
		September	0,34	
10	2019	Maret	0,33	Sedang
		September	0,33	
11	2020	Maret	0,32	Sedang
		September	0,32	

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2020

Data pada tabel 4.2 bahwa angka Gini Rasio di Provinsi Riau yaitu; pada tahun 2010 terjadi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau yang menunjukkan ketimpangan di bulan Maret 2010 sampai dengan September 2010. Dengan nilai Gini Rasio sebesar 0.32. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0.3$ artinya ketimpangan rendah, $0.3 < G < 0.5$ artinya ketimpangan sedang dan apabila $G > 0.5$ artinya ketimpangan tinggi. Maka dengan Gini Rasio 0.32 ketimpangan yang terjadi di Provinsi Riau tahun 2010, pada kategori *sedang*. Pada tahun 2011 terjadi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau yang menunjukkan ketimpangan bulan Maret 2011 sampai dengan September 2011. Dengan nilai Gini Rasio pada bulan Maret sebesar 0.36 dan pada bulan September sebesar 0.32. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0.3$ artinya ketimpangan rendah, $0.3 < G < 0.5$ artinya ketimpangan sedang dan apabila $G > 0.5$ artinya ketimpangan tinggi. Maka dengan Gini Rasio pada bulan Maret 0.36 dan pada bulan September 0.32 ketimpangan yang terjadi di Provinsi Riau tahun 2011, pada kategori *sedang*. Pada tahun 2012 terjadi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau yang menunjukkan ketimpangan bulan Maret 2012 sampai dengan September 2012. Dengan nilai Gini Rasio pada bulan Maret sebesar 0.40 dan pada bulan September sebesar 0.38. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0.3$ artinya ketimpangan rendah, $0.3 < G < 0.5$ artinya ketimpangan sedang dan apabila $G > 0.5$ artinya ketimpangan tinggi. Maka dengan Gini Rasio pada bulan Maret 0.40 dan pada bulan September 0.38 ketimpangan yang terjadi di Provinsi Riau tahun 2012 mengalami fluktuasi walaupun begitu hal ini

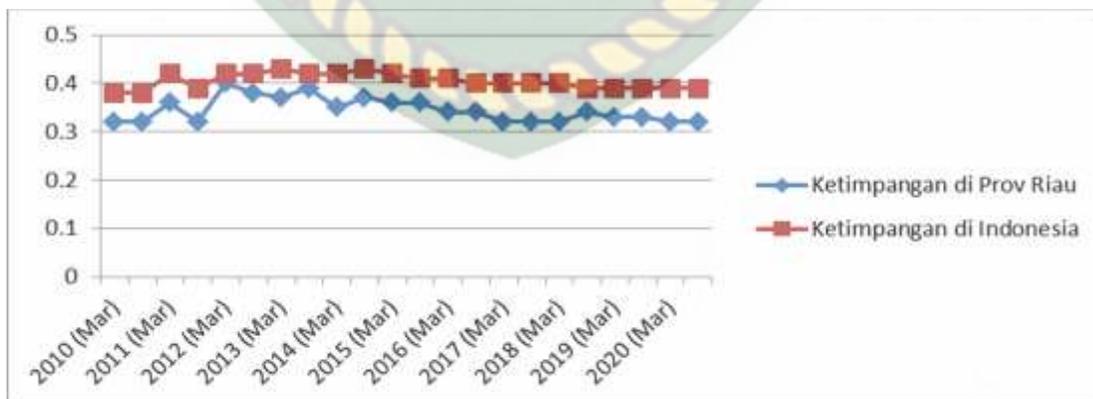
masig dikategorikan sedang, pada kategori *sedang*. Pada tahun 2013 terjadi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau yang menunjukkan ketimpangan bulan Maret 2013 sampai dengan September 2013. Dengan nilai Gini Rasio pada bulan Maret sebesar 0.37 dan pada bulan September sebesar 0.39. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0.3$ artinya ketimpangan rendah, $0.3 < G < 0.5$ artinya ketimpangan sedang dan apabila $G > 0.5$ artinya ketimpangan tinggi. Maka dengan Gini Rasio pada bulan Maret 0.37 dan pada bulan September 0.39 ketimpangan yang terjadi di Provinsi Riau tahun 2013, pada kategori *sedang*. Pada tahun 2014 terjadi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau yang menunjukkan ketimpangan bulan Maret 2014 sampai dengan September 2014. Dengan nilai Gini Rasio pada bulan Maret sebesar 0.35 dan pada bulan September sebesar 0.37. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, jika $G < 0.3$ artinya ketimpangan rendah, $0.3 < G < 0.5$ artinya ketimpangan sedang dan apabila $G > 0.5$ artinya ketimpangan tinggi. Maka dengan Gini Rasio pada bulan Maret 0.35 dan pada bulan September 0.37 ketimpangan yang terjadi di Provinsi Riau tahun 2014, pada kategori *sedang*. Pada tahun 2015 terjadi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau yang menunjukkan ketimpangan bulan Maret 2015 sampai dengan September 2015. Dengan nilai Gini Rasio pada bulan Maret sebesar 0.36 dan pada bulan September sebesar 0.36. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, jika $G < 0.3$ artinya ketimpangan rendah, $0.3 < G < 0.5$ artinya ketimpangan sedang dan apabila $G > 0.5$ artinya ketimpangan tinggi. Maka dengan Gini Rasio pada bulan Maret 0.36 dan pada bulan September 0.36 ketimpangan yang

terjadi di Provinsi Riau tahun 2015, pada kategori *sedang*. pada tahun 2016 terjadi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau yang menunjukkan ketimpangan bulan Maret 2016 sampai dengan September 2016. Dengan nilai Gini Rasio pada bulan Maret sebesar 0.34 dan pada bulan September sebesar 0.34. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0.3$ artinya ketimpangan rendah, $0.3 < G < 0.5$ artinya ketimpangan sedang dan apabila $G > 0.5$ artinya ketimpangan tinggi. Maka dengan Gini Rasio pada bulan Maret 0.34 dan pada bulan September 0.34 ketimpangan yang terjadi di Provinsi Riau tahun 2016, pada kategori *sedang*. pada tahun 2017 terjadi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau yang menunjukkan ketimpangan bulan Mraet 2017 sampai dengan September 2017. Dengan nilai Gini Rasio pada bulan Maret sebesar 0.32 dan pada bulan September sebesar 0.32. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0.3$ artinya ketimpangan rendah, $0.3 < G < 0.5$ artinya ketimpangan sedang dan apabila $G > 0.5$ artinya ketimpangan tinggi. Maka dengan Gini Rasio pada bulan Maret 0.32 dan pada bulan September 0.32 ketimpangan yang terjadi di Provinsi Riau tahun 2017, pada kategori *sedang*. pada tahun 2018 terjadi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau yang menunjukkan ketimpangan bulan Maret sebesar 0.32 dan pada bulan September sebesar 0.34. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0.3$ artinya ketimpangan rendah, $0.3 < G < 0.5$ artinya ketimpangan sedang dan apabila $G > 0.5$ artinya ketimpangan tinggi. Maka dengan Gini Rasio pada bulan Maret 0.32 dan pada bulan September 0.34 ketimpangan yang terjadi di Provinsi Riau tahun 2018, pada kategori *sedang*. pada tahun 2019 terjadi

ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau yang menunjukkan ketimpangan bulan Maret 2019 sampai dengan September 2019. Dengan nilai Gini Rasio pada bulan Maret sebesar 0.33 dan pada bulan September sebesar 0.33. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0.3$ artinya ketimpangan rendah, $0.3 < G < 0.5$ artinya ketimpangan sedang dan apabila $G > 0.5$ artinya ketimpangan tinggi. Maka dengan Gini Rasio pada bulan Maret 0.33 dan pada bulan September 0.33 ketimpangan yang terjadi di Provinsi Riau tahun 2019, pada kategori *sedang*. pada tahun 2020 terjadi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau yang menunjukkan ketimpangan bulan Maret 2020. Dengan nilai Gini Rasio sebesar 0.32. nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0.3$ artinya ketimpangan rendah, $0.3 < G < 0.5$ artinya ketimpangan sedang dan apabila $G > 0.5$ artinya ketimpangan tinggi. Maka ketimpangan yang terjadi di Provinsi Riau tahun 2020, pada kategori *sedang*.

Rata-rata perbandingan ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau dan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1 Perkembangan Gini Ratio



Sumber : BPS, 2021

4.2.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau Menekan Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan keterangan dan perumusan yang telah dikemukakan dalam penelitian, dari hasil penelitian diperoleh melalui analisis secara kuantitatif, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan Gini Ratio dalam menganalisa sebagai alat untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat distribusi ketimpangan pendapatan, serta akan dijelaskan secara rinci peran pemerintah dalam menekan tingkat ketimpangan. Berikut dibawah akan dijelaskan peran pemerintah sangat berpengaruh dalam membuat kebijakan untuk menekan tingkat ketimpangan pendapatan, yaitu :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil dari analisa, ketimpangan ekonomi masih saja terjadi. Untuk itu, pemerintah daerah melancarkan strategi berjangka panjang dan pendek sebagai bentuk intervensi demi melangsukan untuk menekan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan umumnya di Provinsi Riau dan secara khusus ditujukan kepada daerah, khususnya Provinsi Riau sebagai objek penelitian maka adapun strategi yang dimaksud sebagai berikut :

a. Jangka panjang

- Mengembangkan mutu pendidikan khususnya di daerah pinggiran sebagai upaya meningkatkan kemampuan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Meningkatkan mutu dan etos kerja sumber daya manusia yang ada agar dapat diandalkan dalam persaingan global

- Melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan dengan penekanan sektor unggulan secara terpadu dan sinergi antar sektor unggulan secara terpadu dan sinergi antar sektor maupun antar wilayah
 - Membangun infrastruktur untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dikemudian hari agar meratanya distribusi barang dan jasa antar wilayah
- b. Jangka pendek
- Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia
 - Pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan
2. Kebijakan Pemerintah Pusat

Ketimpangan merupakan satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi selain dari kemiskinan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia. Keempat indikator tersebut menjadi bahan evaluasi setiap tahunnya untuk mengukur keberhasilan pembangunan.

Menurut bappenas ketimpangan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh perbedaan konsumsi pertumbuhan konsumsi riil di tiga kelompok masyarakat, yaitu 40 % terbawah, 40 % menengah, dan 20 % teratas. Naik turunnya gini ratio di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai pemerataan maka dapat meningkatkan gini ratio atau ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai pemerataan sehingga manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah optimis pemerataan ekonomi yang berkeadilan dapat membuat bangsa Indonesia semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Strategi yang dilakukan sebagai berikut :

1. Yang dilakukan pemerintah terkait kesehatan anak usia 5 tahun ke bawah, khususnya terkait stunting (kurang gizi). Stunting dipandang memperparah kemiskinan sehingga harus diturunkan. Perlu diketahui bahwa stunting di Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting yang tinggi, yaitu sekitar 36 %. Hal ini sangat berkaitan dengan suatu pembangunan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan. Jika anak terlahir sehat maka tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa. Sementara stunting dapat berdampak pada penurunan IQ anak Indonesia sebanyak 10-15 poin, prestasi akademik anak yang buruk lebih lanjut anak diprediksi meraih pendapatan 20% lebih rendah diusia kerja, sehingga memperparah kemiskinan dan mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang.
2. Bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Masih banyak warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan karena kurangnya sinkronisasi data. Untuk mewujudkan basis data yang akurat, pemerintah daerah mesti mendukung dengan mempermudah pemberian akte kelahiran maupun akte pernikahan.

Sehingga, setiap keluarga memiliki kartu keluarga dan setiap warga negara memiliki nomor induk kependudukan.

3. Peluang pekerjaan, karena pertumbuhan ekonomi didukung oleh penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah memprioritaskan untuk pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan lebih mudah diserap pasar tenaga kerja.
4. Menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja. Sedangkan, pajak penghasilan orang pribadi belum optimal. Padahal, kalangan di luar pekerja seperti direksi, pengusaha, pemilik modal lebih besar kewajiban pajaknya dibanding para pekerja.
5. Menciptkan wirausaha secara massal. Sebagai contoh yang terjadi di Asia Timur seperti Taiwan dan Korea, di mana kemiskinan diatasi dengan berwirausaha.

Tantangan pelaksanaan strategi itu adalah kerja sama dari berbagai pihak di internal pemerintahan. Selain itu, dukungan dari swasta khususnya dunia usaha dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Riau tahun 2010-2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Gini Rasio Provinsi Riau sejak tahun 2010-2020 berada di angka lebih dari 0,3, angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki tingkat ketimpangan yang relatif sedang. Akan tetapi angka ini peringatan dini untuk Provinsi Riau agar bisa mengantisipasi kesenjangan distribusi pendapatan yang ada di kalangan masyarakatnya. Angka kesenjangan yang relatif tinggi dapat menyebabkan terjadinya kecemburuan-kecemburuan sosial diantara masyarakat, sehingga bisa menyebabkan adanya konflik sosial serta tindakan kriminal lainnya..
2. Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam mengatasi tingkat distribusi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau, dengan adanya kebijakan yang dibuat dan mengarah kepada hal yang membuat strategi sebagai bentuk intervensi demi melangsungkan untuk menekan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan tujuan untuk mensejahterakan di berbagai lapisan masyarakat.

5.2 Saran

Memperhatikan analisis data dan kesimpulan maka saran dari kajian ini adalah:

1. Perlu dilakukan penyesuaian tingkat upah nominal sejalan dengan indikator tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehingga porsi pengeluaran makanan dan non makanan masyarakat dapat merepresentasikan kebutuhan masyarakat.
2. Sudah seharusnya pemerintah Provinsi Riau mengarahkan APBD nya untuk tujuan-tujuan perbaikan dan peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan yang ada.
3. Perbaikan distribusi pendapatan dapat dilakukan/sejalan dengan program-program pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, sehingga melalui pengurangan pengangguran dan pengurangan tingkat kemiskinan porsi pengeluaran/belanja makanan dan non makanan penduduk dapat lebih merata sejalan dengan semakin turunnya jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran.
4. Memaksimalkan setiap potensi SDA yang ada di masing-masing daerah sebagai bentuk untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, serta di berengi dengan meningkatkan SDM yang ada dengan memberikan pelatihan dan semacamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Smith, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta. .
- Andhi Wijayanto. 2016. *Pengaruh Frekuensi Perdagangan Saham, Volume Perdagangan Saham, Kapitalisasi pasar dan Jumlah dari perdagangan terhadap Return Saham, Management Analysis Journal Universitas Negri Malang*.
- Arief Munandar, Fikriah. 2016. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengeluaran antar Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya*.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STEIYKPN.
- Arsyad, Azhar. 2002. *Media Pembelajaran, edisi 1*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Syaifudin. 2001. *Metode Penelitian, edisi 1, cet 3*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Riau. 2010-2019*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Jumlah Penduduk Provinsi Riau. 2010-2019*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). www.bps.go.id.
- Iswanto, Denny. 2005. *Ketimpangan Pendapatan antar Kab/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. No, 1. Vol, 4*
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Salemba empat.
- Maipita, 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, jilid 1*. Erlangga. Jakarta.
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo.
- Myrdal. 1975. *Economic Theory and Under development in Region*. London Matheun.
- Program Pembangunan Daerah (PROPEDA). *Provinsi Riau. 200-2005*

Sadono, Sukirno. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar, edisi ketiga*. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta.

Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Problematika, dan Pendekatan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sutarno, N. S. 2003. *Perpustakaan dan Masyarakat*.

Tambunan, 2001. *Perekonomian Indonesia: teori dan temuan empiris* : Ghalia Indonesia.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisi kedelapan*. Jakarta : Erlangga.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi, edisi kesembilan, jilid 1*. Jakarta : Erlangga.

